

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan ditarik didasarkan pada permasalahan, deskripsi dan analisis hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu.

1. Organisasi pelaksanaan program penyetaraan D-II guru SD di Kota Madya Pekanbaru.

- a. Pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan program penyetaraan D-II guru SD, belum memahami akan tugasnya masing-masing, sehingga pelaksanaan penyetaraan D-II belum efektif.
- b. Koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan program penyetaraan D-II belum terjalin kerjasama yang harmonis, baik Depdikbud, maupun Dinas P dan K atau dengan Pemda.
- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya memahami akan tugas masing-masing instansi yang terkait, sehingga keberadaan program penyetaraan D-II kurang efektif.

2. Efektivitas dan efisiensi pengawasan pelaksanaan program penyetaraan D-II guru SD

Pengawasan program pengajaran D-II guru SD belum dilaksanakan sebagaimana semestinya, artinya pengawasan itu sendiri belum berjalan secara efektif.

- a. Tujuan dan sasaran pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi edukasi, dapat ditinjau dari segi produktivitas atau efektivitas dan efisiensi edukasi program

penyetaraan D-II guru SD tersebut.

Dilihat dari sudut efisiensinya, penyusunan pengawasan program penyetaraan D-II guru SD di Kotamadya Pekanbaru oleh kepala UPBJJ kurang efisien dibandingkan dengan program penyetaraan D-II guru SD yang dikelola oleh LPTK Universitas Riau. Karena rencana yang disusun lebih banyak berpedoman kepada rencana yang sebelumnya, tanpa ada pembaharuan demi untuk peningkatan mutu program penyetaraan D-II itu sendiri.

Hal ini memungkinkan disebabkan oleh karena kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan komitmen) kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan D-II LPTK UNRI dalam bidang penyusunan rencana program penyetaraan D-II tersebut.

Namun pada kedua program penyetaraan D-II itu, rencana pembangunan dan pengembangan program sama-sama tidak disusun. Ini disebabkan karena selama ini program penyetaraan D-II tidak dituntut untuk menyusun rencana tersebut. Guru-guru/tutor dan dosen yang ada pada kedua program penyetaraan ini sangat berdeda kualitasnya baik dalam penampilan dimuka kelas, maupu dalam pembuatan satuan acauan pengajaran.

b. Aspek-aspek yang diawasi dalam pelaksanaan program penyetaraan D-II guru SD adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan program pengajaran; pengawasan program pengajaran pada program penyetaraan guru SD di Kota Madya Pekanbaru secara umum cukup efektif. Dimana, pada kedua program penyetaraan yang diteliti, sebagian besar kegiatan-kegiatan pengawasan program pengajaran sama-sama telah terlaksana. Hal ini disebabkan karena petunjuk tentang pelaksanaan tugas-

tugas tersebut cukup jelas. Namun dilihat dari pembinaan pembuatan satuan acara pengajaran oleh kepala UPBJJ, ternyata masih belum optimal atau belum lagi terlaksana seperti yang diharapkan. Faktor penyebab belum optimalnya penyusunan rencana/satuan acara pengajaran tersebut antara lain dikarenakan oleh sikap kepala UPBJJ yang kurang tegas/konsisten, kurangnya rasa tanggung jawab guru/tutor atau dosen, dan juga kurangnya manfaat atau keuntungan yang dirasakan oleh guru/tutor atau dosen dari pembuatan satuan acara pengajaran tersebut, sehingga dirasakannya pembuatan satuan acara pengajaran itu hanyalah sebagai beban. Di samping itu, tingkat penguasaan siswa pada program penyetaraan yang dikelola oleh UPBJJ belum optimal, maka tingkat/kualitas penguasaan siswa berbeda antara satu program penyetaraan dengan program penyetaraan lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan kualitas proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru/tutor atau dosen, perbedaan kemampuan dan motivasi belajar siswa.

2. Pengawasan kesiswaan; kegiatan pengawasan kesiswaan pada program penyetaraan guru SD di Kota Madya Pekanbaru juga sudah cukup efektif. Beberapa kegiatan yang belum berjalan dengan lancar adalah kegiatan bimbingan dan penyuluhan, serta ekstra kurikuler. Ketidakterlancaran ini disebabkan karena keterbatasan tenaga, baik dalam jumlah maupun untuk membina kegiatan itu.

Faktor lain yang menyebabkan adalah karena tidak adanya dana khusus untuk membiayai kegiatan tersebut.

3. Pengawasan personil; guru/tutor atau dosen memerlukan perhatian dan pengawasan yang serius, agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagaimana semes-

tinya. Aspek-aspek yang memerlukan perhatian tersebut adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru/tutor atau dosen serta perhatian mereka terhadap hal-hal yang menjadi hak masing-masing guru/tutor atau dosen.

Pengawasan personil ini cukup efektif pada program penyetaraan guru SD di Kota Madya Pekanbaru, meskipun ada diantara komponen pengawasan itu belum dilaksanakan dengan baik, yaitu pengusulan pengadaan personil. Dinilai dari segi kehadiran personil, ternyata pada kedua program penyetaraan yang diteliti berbeda tingkat efektivitasnya. Program penyetaraan yang dikelola oleh PGSD tatap muka lebih efektif dari program penyetaraan yang dikelola oleh UPBJJ-UT Pekanbaru. Perbedaan ini disebabkan karena para guru/tutor atau dosen program penyetaraan yang dikelola oleh UPBJJ sering tidak datang pada waktu diadakan tutorial, disamping itu juga faktor keluarga dan faktor sosial ekonomi, juga turut mewarnai tingkat efektivitas pengawasan personil.

4. Pengawasan keuangan program penyetaraan; pengawasan keuangan pada program penyetaraan guru SD di Kota Madya Pekanbaru belum sepenuhnya efektif, karena ada beberapa kegiatan pokok yang belum terlaksana. Diantara kegiatan tersebut adalah belum ada penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/program. Demikian juga halnya dalam usaha menggali sumber dana dan pembuatan buku kas umum. Sedangkan dalam hal pemanfaatan dan partisipasi guru/tutor atau dosen dalam pengawasan keuangan cukup efektif.

Dilihat dari sisi efisiensinya, kegiatan pengawasan keuangan di atas dapat dilaksanakan secara efisien, karena dalam pemanfaatan fasilitas dan

tenaga yang ada disekolah/pada program penyetaraan kegiatan pengawasan keuangan dapat berjalan dengan baik dan semua dana dapat terlaksana sesuai dengan tahun anggaran.

5. Sarana dan Prasarana; adalah salah satu komponen pokok dalam pelaksanaan program pendidikan di setiap sekolah/program penyetaraan. Maka dari itu komponen ini jelas memerlukan penanganan yang baik. Pengawasan sarana pendidikan pada program penyetaraan guru SD di Kota Madya Pekanbaru belum lagi efektif, karena masih banyak alat-alat pelajaran dan buku pelajaran yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik oleh guru/tutor atau dosen maupun siswa. Di samping itu kegiatan pencatatan atau inventaris sarana pendidikan pada program penyetaraan ini juga tidak lengkap, sehingga tidak bisa dilihat pertumbuhan sarana pendidikan dari tahun ketahun.

Banyaknya alat-alat yang belum dimanfaatkan, baik oleh guru/tutor atau dosen maupun siswa, maka pengawasan sarana belum lagi efisien. Sedangkan pengawasan prasarana pendidikan (gedung dan perlengkapan sekolah/program penyetaraan) telah dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. termasuk pekarangan sekolah dan sebagainya.

Belum efektifnya kegiatan pengawasan sarana dan prasarana ini juga disebabkan karena berbagai keterbatasan yang berasal dari kepala UPBJJ atau ketua program penyetaraan maupun dari pihak guru/tutor atau dosennya di samping keterbatasan prasarana lainnya seperti ruang baca/perpustakaan. Akibatnya, usaha untuk memanfaatkan buku-buku yang ada serta motivasi siswa untuk membaca dan belajar juga semakin menurun.

6. Pengawasan dan pembinaan hubungan sekolah/program penyetaran dengan

masyarakat pada program penyetaraan guru SD di Kota Madya Pekanbaru ini belum lagi efektif dan efisien. Dari kedua program penyetaraan yang diteliti, hanya program penyetaraan yang dikelola oleh PGSD tatap muka, yang pengawasan hubungan sekolah dengan masyarakat sudah agak baik bila dibandingkan dengan program penyetaraan yang dikelola oleh UPBJJ. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh program penyetaraan yang dikelola oleh PGSD tatap muka, demikian juga sebaliknya.

Belum efektifnya pengawasan hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain disebabkan karena kurangnya usaha atau pendekatan yang dilakukan oleh kepala UPBJJ untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di samping itu, imege masyarakat yang masih menganggap bahwa sekolahlah yang bertanggung jawab untuk pendidikan.

3. Mekanisme sistem informasi pengawasan program penyetaraan D-II guru SD.

Adapun sistem informasi pengawasan terhadap program penyetaraan D-II guru SD meliputi:

- a. Pengawasan terhadap kelompok belajar di tingkat sekolah dilakukan oleh pengelola pendidikan di kecamatan.
- b. Pengawasan di tingkat kecamatan dilakukan bersama-sama oleh Kadep Dikbud Kotamadya dan Dinas P dan K Tingkat II Kotamadya
- c. Pengawasan di tingkat Kodya/Kabupaten dilaksanakan oleh Kakanwil Depdikbud serta Dinas P dan K Provinsi.
- d. Setiap hasil pengawasan yang dianggap bermasalah, didiskusikan di tingkat Kotamadya dan Provinsi.

- e. Masalah yang belum dapat diselesaikan ditingkat Kotamadya dan Provinsi, maka akan diselesaikan di tingkat pusat.
1. Informasi-informasi yang diperlukan, diantaranya ialah:
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan program penyetaraan D-II guru SD mulai dari pengelola, sampai kepada instansi yang terkait.
 - b. Pelaporan dengan alur laporan mulai dari kecamatan ke tingkat Kotamadya/Kabupaten, selanjutnya ketingkat Provinsi dan seterusnya ke pusat, yaitu Ditjen dan UT.
 2. Pemanfaatan informasi pengawasan, didapat dari hasil informasi dilapangan dan untuk selanjutnya dipergunakan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program penyetaraan D-II guru SD. Selanjutnya kepada instansi yang terkait hendaknya betul-betul dapat memberi masukan yang bermanfaat.
 3. Efektivitas pelaksanaan sistem informasi pengawasan, dimulai dari sumber informasi dan data yang baik sehubungan dengan masalah yang dihadapi. kemudian persiapan pelaksanaan serta masukan-masukan dari pihak kritikus-kritikus yang bersifat membangun.

Adapun untuk mendapatkan efektivitas sistem informasi pengawasan dimulai dari observasi kelas, melalui pertemuan-pertemuan atau rapat pengawasan dan melalui diskusi-diskusi serta pemakaian teknik-teknik lain yang akan mengacu kepada efektifnya pelaksanaan pengawasan program penyetaraan D-II guru SD.

4. Tindak lanjut hasil pengawasan.

- a. Dilihat dari prestasi kedua program penyetaraan tersebut, ternyata bervariasi, ada yang baik dan ada pula yang kurang efektivitasnya. Adanya perbedaan ini

dikarenakan oleh perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan komitmen para guru/tutor atau dosen maupun pimpinan program penyetaraan terhadap tugas mereka. Di samping itu juga faktor lingkungan keluarga dan masyarakat, kemampuan, serta motivasi siswa.

- b. Efektivitas edukasi program penyetaraan D-II UPBJJ guru SD di Kota Madya Pekanbaru boleh dikatakan kurang efektif perlu kerja keras. Hal ini dinilai dari jumlah lulusan, namun pada program penyetaraan yang dikelola oleh PGSD tatap muka prestasi lulusannya jauh lebih baik dari program penyetaraan yang dikelola oleh UPBJJ-UT Pekanbaru. Perbedaan ini disebabkan karena latar belakang faktor keluarga, pendidikan, ekonomi, dan persepsi mereka terhadap pendidikan.
- c. Kecenderungan tingkat efisiensi edukasi pada program penyetaraan yang diteliti dinilai dari tingkat mengulang siswa atau student years yang dihabiskan oleh siswa tertentu untuk menghasilkan lulusannya juga masih rendah. Hal ini disebabkan tingkat mengulang siswa yang cukup tinggi.
- d. Efektivitas dan efisiensi pada program penyetaraan dalam empat tahun terakhir ini cenderung tidak ada peningkatan. Namun dari tiga aspek di atas (a, b, c), dapat disimpulkan bahwa program penyetaraan yang dikelola oleh PGSD jauh lebih baik dari program penyetaraan yang dikelola oleh UPBJJ, yang nilai prestasinya kelulusannya lebih rendah baik tingkat keberhasilan atau nilai prestasi siswa.

B. Rekomendasi

Rekomendasi berikut merupakan implikasi lebih lanjut dari hasil penelitian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pelaksanaan program penyetaraan.

1. Untuk Guru/Tutor atau Dosen

Guru/tutor atau dosen sebagai patner kepala UPBJJ atau ketua program penyetaraan dalam pelaksanaan pendidikan, diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam pengawasan sekolah/program penyetaraan (tidak hanya melaksanakan tugas mengajar). Partisipasi aktif ini dapat wujudkan dalam bentuk peningkatan kemampuan profesional, juga diharapkan memberi masukan atau ide-ide bagi kepala UPBJJ atau ketua program penyetaraan sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi pengawasan program penyetaraan, melaksanakan tugas secara disiplin, membangkitkan motivasi siswa dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa. Apabila kegiatan-kegiatan tersebut sudah terlaksana sebagaimana mestinya, maka tingkat efektivitas dan efisiensi pengawasan program penyetaraan secara khusus dan mencapai tujuan pendidikan secara umum akan dapat diraih.

2. Untuk kepala UPBJJ dan Ketua program penyetaraan D-II

a. Kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan sebagai pengelola atau administrator program penyetaraan, bertanggung jawab keberhasilan program penyetaraan yang dipimpinnya. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan baik, jelas memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dengan demikian kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hubungan dengan pengawasan pelaksanaan program penyetaraan. Usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan ini dapat saja dilakukan melalui jalur pendidikan formal (baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan lembaga lain yang bertanggung jawab).

Supaya kegiatan pengawasan pelaksanaan program penyetaraan dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah dan teratur, serta mudah untuk mengevaluasinya, maka kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan seharusnya bersama-sama guru-guru menyusun suatu perencanaan pengawasan program penyetaraan secara lengkap. Perencanaan yang disusun tidak saja mengenai kegiatan-kegiatan rutinitas, tapi juga kegiatan-kegiatan pengembangan program penyetaraan untuk jangka lima tahun, untuk selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci menjadi rencana satu tahun. Dengan sistem perencanaan seperti ini, maka dapat dinilai perkembangan dan kemajuan program penyetaraan dari tahun ke tahun.

- b. Keberhasilan pendidikan dan pengajaran pada suatu sekolah/program penyetaraan, salah satunya sangat ditentukan oleh keadaan guru/tutor atau dosen pada program penyetaraan yang bersangkutan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan berusaha supaya di sekolahnya tersedia tenaga/personil yang cukup dan menciptakan suasana yang mendorong guru/personil untuk menyumbangkan kemampuannya secara optimal untuk kepentingan program penyetaraan.
- c. Kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan adalah ujung tombak bagi tercapainya tujuan pendidikan karena disanalah kurikulum akan diwujudkan menjadi perilaku belajar mengajar yang nyata. Kurikulum yang telah disusun baru akan berarti bila telah dilaksanakan menjadi tindakan nyata didalam kelas. Untuk dapat dilaksanakan, kurikulum tersebut hendaknya dikembangkan sampai menjadi suatu program pengajaran yang operasional yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar. Dalam mengembangkan program pengajaran

pimpinan suatu sekolah harus mempertimbangkan aspek sosiologis, aspek psikologis, pedagogis dan lain sebagainya.

- d. Pada hakekatnya tujuan dari proses pendidikan dan pengajaran di program penyetaraan adalah membantu mengembangkan kemampuan para peserta didik secara optimal sehingga menjadi manusia seutuhnya. Jadi tugas kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan bukan saja memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membimbing siswa menuju kearah kedewasaan. Maka dari itu kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan berusaha menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler dalam suasana proses belajar mengajar.
- e. Sehubungan dengan dana, hendaknya kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan berusaha supaya dana tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang benar-benar bisa menunjang situasi belajar mengajar yang lebih baik untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengejaran program penyetaraan.

Begitu juga halnya dengan fasilitas, buku-buku dan alat-alat pelajaran yang ada, kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan secara terus menerus untuk mendorong dan membina dan membimbing karyawan lainnya supaya memanfaatkannya untuk proses belajar mengajar yang akhirnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran.

- f. Dalam membina hubungan sekolah dan masyarakat seharusnya dilakukan kerjasama yang terpadu dan terintegrasi antara kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan, pemerintah setempat, organisasi masyarakat lainnya, serta dengan kantor Depdikbud, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi yang terkait lainnya.

g. *Supervisi* adalah salah satu tugas pokok kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan yang harus mendapat perhatian paling banyak dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain. Namun dari hasil penelitian ternyata kepala UPBJJ belum lagi memberikan perhatian seperti yang diharapkan. dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, maka kepala UPBJJ harus lebih meningkatkan perhatian dan usahanya untuk melaksanakan *supervisi* bagi guru/tutor atau dosen, karena hakekatnya *supervisi* adalah memperbaiki situasi belajar mengajar.

Supervisi yang dilakukan oleh kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan harus meliputi kemampuan guru/tutor atau dosen dalam merencanakan pengajaran seperti penyajian materi, mengelola kegiatan belajar mengajar dan lingkungan dan sumber belajar, pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar, yang merupakan umpan balik dari pembinaan profesional guru tersebut.

3. Untuk pengawas

Pengawas sebagai tenaga fungsional yang bertanggung jawab membina guru dan pimpinan suatu lembaga pendidikan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan pendidikan, dan juga peningkatan mutu pendidikan, perlu meningkatkan perhatiannya terhadap peran yang dimainkan kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan, disamping pembinaan yang dilakukan terhadap guru. Pembinaan yang diberikan oleh pengawas sebaiknya jangan dilaksanakan secara terpisah, melainkan secara bersama-sama antara pengawas dan kepala UPBJJ dan ketua program penyetaraan dan sekaligus guru. Sebab, dengan cara demikian masing-masing pihak diharapkan dapat mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing.

4. Untuk Kandepdikbud

Secara struktural organisasi, Kandepdikbud merupakan badan pengelola yang bertugas membantu dan membina kelancaran pelaksanaan pendidikan pada program penyetaraan yang ada dalam wilayah kerjanya. Untuk memantau jalanya kegiatan pendidikan program penyetaraan guru SD, diperlukan adanya rencana yang tersusun dengan baik yang juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di samping personil khusus yang bertugas untuk melaksanakannya. Dengan adanya program dan personil pelaksana ini, usaha pengawasan dan pembinaan akan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun.

Berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan, ternyata peran yang seharusnya dimainkan oleh Kandepdikbud cenderung masih belum optimal atau bersifat insidental. Maka dari itu, merujuk kepada perannya sebagai pengelola operasionalisasi pendidikan program penyetaraan, diharapkan mereka dapat memberi petunjuk, bimbingan, dan pengawasan yang bersifat komprehensif terhadap segala sesuatu yang merupakan komponen dalam penyelenggaraan pendidikan program penyetaraan D-II guru SD.

Di samping itu usaha memberi petunjuk, pembinaan, dan pengawasan, perlu juga kiranya pihak Kandepdikbud ini memikirkan pengoptimalisasian fungsi dari pada wadah-wadah peningkatan kualitas pengelolaan tingkat program penyetaraan yang sudah ada dan bila perlu menciptakan suatu wadah baru yang dirasakan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan pelaksanaan pendidikan program penyetaraan guru sekolah dasar.

5. Untuk Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan TK I dan TK II serta PEMDA Tk I Riau.

Pelaksanaan program penyetaraan guru SD, bisa kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam hal ini FIP Universitas Riau, khususnya administrasi pendidikan. Kerjasama ini bisa dalam bentuk penyediaan nara sumber atau pengelola pelaksanaan, yaitu meminta kepada FIP UNRI jurusan Administrasi pendidikan untuk menyelenggarakan suatu program khusus dalam rangka pelaksanaan program penyetaraan guru SD dengan program D II.

Tugas-tugas ini menuntut perkembangan yang terus menerus dari kepala UPBJJ, karena pendidikan itu selalu berkembang baik karena pengaruh perubahan sistem atau perkembangan sistem sosial lainnya di luar pendidikan maka dari itu, kepala UPBJJ diperlukan suatu program agar dapat mengembangkan program yang ada dalam program penyetaraan D-II guru SD itu sendiri, agar dapat meningkatkan mutu lulusan program penyetaraan D-II yang dikelola oleh UPBJJ, baik disegi lulusannya secara kuantitatif maupun lulusannya secara kualitatif .

Di samping itu juga disarankan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tk I atau Pemda Tk I untuk meningkatkan penyediaan/bantuan dana dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program penyetaraan, dan penyediaan dana intensif bagi para pengawas yang bertugas. Dan begitu juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tk II, agar dalam penyaringan siswa yang akan ikut dalam pendidikan program penyetaraan harus mempunyai strategi yang matang.

Selanjutnya, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tk I dan Kanwil Depdikbud Tk I beserta jajarannya supaya lebih meningkatkan koordinasi serta kerjasama dalam usaha pembinaan dan pengembangan personil program penyetaraan guru SD di Kota Madya Pekanbaru secara keseluruhan pada umumnya.

